

TESIS

**PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM PENGELOLAAN INFORMASI
DI KABUPATEN LUWU**

Muh. Rivaldi A. Tadda

E062211003



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

TESIS

**PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM PENGELOLAAN INFORMASI
DI KABUPATEN LUWU**

Muh. Rivaldi A. Tadda

E062211003



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

**PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM PENGELOLAAN INFORMASI
DI KABUPATEN LUWU**

Tesis

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar magister
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Disusun dan diajukan oleh

Muh. Rivaldi A. Tadda

E062211003

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

TESIS

**PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM PENGELOLAAN
INFORMASI DI KABUPATEN LUWU**

Disusun dan diajukan oleh

MUH. RIVALDI A. TADDA

Nomor Pokok : E062211003

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

pada tanggal **16 November 2022**

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui

Ketua

Anggota Penasehat

Prof. Dr. Nurlinah, M.Si.
NIP:196309211987022001

Dr. Phil Sukri, S.IP., M.Si.
NIP. 197508200811008

Ketua Program Studi Magister
Ilmu Pemerintahan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,

Prof. Dr. Nurlinah, M.Si.
NIP:196309211987022001



Dr. Phil Sukri, S.IP., M.Si.
NIP. 197508200811008

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muh. Rivaldi A. Tadda

Nomor Induk Mahasiswa : E062211003

Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar – benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari saya terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini adalah tesis hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 23 November 2022

Yang Menyatakan



Muh. Rivaldi A. Tadda

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, Sehingga tesis ini dapat tersusun untuk dapat memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Magister Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin. Gagasan yang mendasari penelitian ini adalah adanya keinginan penulis untuk menganalisis bagaimana penerapan *E-Government* dalam pengelolaan Informasi di Kabupaten Luwu.

Proses Penyusunan tesis ini sangatlah tidak mudah, karena peneliti harus dapat mengatur waktu untuk melakukan penelitian di kantor Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu beserta beberapa Dinas Pemerintahan, Aparatur Sipil Negara Kabupaten Luwu, Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu dan Masyarakat. Saran serta masukan yang sangat berharga dari dosen pembimbing dan dosen penguji merupakan bagian terpenting dari tesis ini. Kadangkala pengetahuan dan daya analisis peneliti menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan sehingga tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Walaupun demikian, peneliti meyakini bahwa tidak akan ada usaha yang sia-sia, sepanjang kita mau berusaha dan bersungguh-sungguh dengan demikian peneliti berharap tesis ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Keberadaan tesis ini tentu tidak bisa terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, maka perkenankan peneliti

menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. Nurlinah, M.Si. Selaku Pembimbing 1 (satu) dan Bapak Dr. Phil Sukri, S.IP., M.Si. Selaku pembimbing 2 (dua) yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis dari penyusunan proposal penelitian hingga selesainya tesis ini.

Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Hasniati, S.Sos.,M.Si., Bapak Dr. A. Lukman, S.IP., M.Si, Bapak Dr. Suhardiman Syamsu, M.Si, Selaku penguji yang sabar menguji dan memberikan masukan, kritik, dan saran yang sangat berharga mulai dari seminar proposal penelitian sampai selesai.

Pada kesempatan yang berharga ini, penulis juga menghaturkan penghargaan dan terima kasih kepada segenap pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dari awal menjalani proses perkuliahan hingga penyelesaian tesis ini, Kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M, Sc., Selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya, Direktur dan Staf Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Dr. Phil. Sukri, S. IP.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta jajaran pimpinan fakultas, dosen dan staf akademik Fisip Universitas Hasanuddin.
3. Ibu Prof. Dr. Nurlinah,M.Si. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan beserta segenap staf akademik.

4. Bapak H. Sulaiman, MM, Selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu beserta jajaran yang telah memperkenankan penulis dalam melakukan penelitian serta dukungan selama penulis melakukan penelitian.
5. Bapak Irwan S.Sos., M.M, selaku Kepala Dinas Kominfo dan beberapa pimpinan dinas Kabupaten Luwu yang telah memberikan informasi,dukungan dan tentunya izin selama penulis melakukan penelitian.
6. Terkhusus Orang Tuaku, Ibuku Badewiah dan Bapak A. Burda A. Tadda (Almarhum) yang telah memberikan doa, dukungan moril dan materil sehingga penelitian ini dapat berjalan lancar.
7. Seluruh Keluarga Besarku, Kakakku, Besse Asdewiati A. Tadda, Aswandi A, Tadda, Asbar Dewandi A. Tadda dan Asrial Aksan Syarif A.Tadda beserta sepupu-sepupuku yang telah memberikan motivasi dukungan moral dan materil untuk menyelesaikan pendidikan magisterku.
8. Bapak Jabbar Idris ST selaku Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang telah memberi dukungan moral dan materil dari awal pendaftaran hingga penyelesain magisterku
9. Teman- teman seperjuanganku pada program studi Ilmu pemerintahan angkatan 2021 yang senantiasa selalu memberikan motivasi dan dukungan serta selalu mengingatkan untuk mengerjakan tesis ini kalian semua luar biasa.

10. Dan kepada segenap pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, kepada mereka semua, tiada hal yang dapat disampaikan kecuali terima kasih yang tulus serta sebesar- besarnya atas segala bantuannya.

Dengan pengantar ini semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita dijalan yang lurus dan berguna bagi sesama, Insya Allah, Aaminn ya rabbal alamin.

Makassar, 23 November 2022

Muh. Rivaldi A. Tadda

ABSTRAK

MUH. RIVALDI A. TADDA. *Penerapan E-Government dalam Pengelolaan Informasi di Kabupaten Luwu* (dibimbing oleh Nurlinah dan Sukri).

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi, menggali, dan menganalisis proses implementasi *e-Government* dalam pengelolaan informasi di Kabupaten Luwu. Kontribusi penelitian ini menjadi rekomendasi dan saran serta untuk meningkatkan *e-Government* dalam pengelolaan informasi di pemerintahan Kabupaten Luwu dan juga untuk mewujudkan *Good Governance* di Kabupaten Luwu. *e-Government* menjanjikan dalam hal layanan yang lebih baik serta penyampaian dan manajemen administrasi yang lebih efisien. Banyak model untuk pengembangan *e-Government* telah dikembangkan untuk pemahaman dan peningkatan *e-Government* dalam beberapa dekade terakhir. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologis. Pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dokumen, dan arsip. Informan penelitian meliputi pimpinan daerah, pimpinan dinas, aparatur sipil negara, dan masyarakat. Sumber data meliputi data primer dan data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan meliputi pereduksian data, kompleksitas data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *e-Government* dalam pengelolaan informasi di Kabupaten Luwu ditinjau dari dua layanan yaitu internal (SISKA) dan layanan eksternal (SIMAP) *berjalan*, namun masih belum optimal dengan beberapa kekurangan yang perlu dibenahi seperti pada layanan siska agar menyediakan aplikasinya di IOS dan layanan SIMAP agar menyediakan aplikasi layanannya di android maupun IOS serta kekurangan secara umum adalah jaringan internet di daerah terpencil.

Kata kunci: Penerapan. *e-Government*, informasi



ABSTRACT

MUH. RIVALDI A. TADDA. *The Implementation of E-Government Policies in Information Management in Luwu Regency* (supervised by Nurlinah abd Sukri)

This study aims to identify, explore, and analyze the process of implementing e-government policies in Information management of Luwu Regency. The contribution of this research is to give recommendations and suggestions, improve e-government in information management of Luwu Regency government, and realize a good governance in Luwu Regency. E-government promises in terms of better Services, delivery, and more efficient administrative management. Many models for e- government development have been developed for the understanding and improvement of e-government in recent decades. This research method is descriptive qualitative with phenomenological research type. Data collection included observations, interviews, documents, and archives. Research informants included regional leaders, Service leaders, state civil apparatus, and the community. The data consisted of primary data and secondary data. The data analysis techniques used were data reduction, data complexity, and drawing conclusions. The results of the study show that the implementation of e-Government in information management in Luwu Regency has been advanced from two services namely internal (SISKA) and external services (SIMAP) that are running, but it is still not optimal with several deficiencies that need to be addressed such as the siska service to provide its application on IOS and SIMAP services to provide their service applications on Android and IOS and the general drawback is the internet network in remote areas.

Keywords: Application. e-Government, information



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	iii
LEMBARAN PENGESAHAN	iv
LEMBARAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Landasan Teori	13
2.1.1 Kebijakan E-Government Dalam Pemerintahan	13
2.1.2 Kontigensi Dalam E-Government.....	20
2.1.3 Kelembagaan Pemerintahan.....	25

2.1.4 Kegunaan Website Dalam E-Government	27
2.1.5 Website Bagian Dari E-Government	28
2.1.6 Good Governance.....	33
2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan	34
2.3 Kerangka Pikir.....	49
BAB III METODE PENELITIAN	50
3.1 Lokasi Penelitian	50
3.2 Jenis dan Tipe Penelitian.....	50
3.3 Sumber Data	51
3.4 Informan Penelitian	51
3.5 Teknik Pengumpulan Data	52
3.6 Teknik Analisis Data	53
3.7 Fokus Penelitian.....	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian.....	56
4.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Luwu	56
4.1.2 Visi dan Misi Kabupaten Luwu	58
4.1.3 Gambaran Khusus Lokasi Penelitian	60
4.2 Hasil Penelitian	69
4.2.1 Penerapan E-Government Dalam Pelayanan Internal	72
4.2.2 Penerapan E-Government Dalam Pelayanan Eksternal	77

4.3 Pembahasan	82
BAB V PENUTUP	86
A. KESIMPULAN	86
B. SARAN	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Data Pengguna Internet	9
Gambar 2.1 Siklus Kebijakan Ideal	17
Gambar 2.2 E-Government Sebagai Sistem Informasi	29
Gambar 2.3 Skema Kerangka Pikir Penelitian	49
Gambar 4.1 Website Kabupaten Luwu	71
Gambar 4.2 Layanan Informasi E-Government Kabupaten Luwu	72
Gambar 4.2.1 Layanan Informasi (Siska) Kabupaten Luwu	77
Gambar 4.2.2 Layanan Informasi (SIMAP) Kabupaten Luwu	81

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tujuh Tonggak Kepemimpinan E-Government	21
Tabel 2.1 Empat Model E-Government	30
Tabel 2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan	36
Tabel 3.1 Informan Peneliti	52

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Sistem informasi adalah suatu aplikasi yang tersusun secara prosedur, terorganisir dan sistematis, pada saat dijalankan akan menghasilkan suatu informasi yang berguna dan bermanfaat bagi organisasi dalam mengelola organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Sistem informasi merupakan salah satu alat bantu yang berguna bagi manajemen untuk mengolah data organisasi dengan kapasitas yang cukup besar. Keunggulan dari sistem informasi ini adalah kecepatan dan ketepatan dalam pengolahan data dengan kapasitas yang cukup besar dan kemudahan serta kecepatan dalam pencarian data pada tumpukan data yang cukup besar. Dari keunggulan dan kemudahan serta kecepatan dalam pengolahan data maka sistem informasi ini sangat bermanfaat bagi semua instansi baik instansi swasta maupun instansi negeri (Nurmi, 2017).

Saat ini perkembangan *Information and Communication Technology* (ICT) telah berkembang dengan sangat cepat untuk terus memudahkan kegiatan manusia. Tak terkecuali kegiatan pemerintahan, baik dalam tata kelola pemerintahan itu sendiri maupun dalam pelayanannya kepada publik. *E-government* sebagai bentuk modernisasi proses pelaksanaan kegiatan pemerintahan secara

keseluruhan juga merupakan suatu perubahan bentuk pelayanan pemerintah kepada warga negaranya, tidak hanya ditaraf pusat tetapi juga di tingkat daerah (Resta,et al.,2013).

E-Government merupakan suatu sistem teknologi informasi yang dikembangkan oleh Pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik dengan memberikan pilihan kepada masyarakat untuk mendapatkan kemudahan akses informasi publik. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dan peningkatan layanan publik yang efektif dan efisien diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan e-government. Kebijakan dan strategi tersebut diatur dalam Inpres No.3 Tahun 2003 mengenai Kebijakan dan Strategi Pengembangan E-Government di Seluruh Jajaran Pemerintah. Nurcahyati dan Daru(2008) pada Seminar Nasional Informatika yang berjudul Peran E-Government dalam Rangka Mewujudkan Good Governance bagi Masyarakat, menyimpulkan bahwa Sosialisasie-government perlu dilakukan secara konsisten, kontinyu kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui manfaat yang akan diperoleh dengane-government.

Kemajuan zaman saat ini banyak yang fokus akan kemajuan teknologi informasi. Hage dan Powers dalam Anwar (2003:111) menyebutkan ciri yang menonjol di era kemajuan teknologi komunikasi dan informasi ini adalah digunakannya teknologi komputer.

Perkembangan teknologi komputer semakin meluas di setiap lapisan kehidupan. Teknologi informasi telah membawa banyak perubahan dalam pola berpikir masyarakat dan juga persepsi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dan pemerintahan. Dapat dilihat dari pola pengambilan keputusan yang telah mulai dilakukan berbagai jenis teknologi informasi yang berupa sajian data berbasis online yang telah berkembang untuk mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan informasi dari segala tingkat masyarakat.

Majunya teknologi informasi modern yang seperti saat ini telah membawa tuntutan yang cukup besar bagi masyarakat untuk pemerintahan yang sebagai penyelenggara layanan untuk lebih bersifat terbuka, lebih efektif, dan efisien dalam menjalankan pemerintahannya, dan dapat memberikan kemudahan dalam mengakses informasi yang khususnya informasi-informasi tentang pemerintahan. Hal ini mendorong pemerintahan untuk melaksanakan konsep tata pemerintahan yang baik yang sering disebut dengan good governance (Cyndika, 2018).

Dalam praktik pengembangan *E-Government* dalam organisasi pemerintahan daerah Indonesia, tahapan perkembangan yang terjadi memang masih berbeda-beda. Ada daerah yang masih sangat ketinggalan dalam hal penggunaan teknologi informasi, bahkan ada yang hingga sekarang belum memiliki situs website (Hutagalung, et al., 2019). Indonesia telah mengatur penggunaan website untuk saling

terhubung dan mendapatkan kemudahan dalam mencari informasi. Dalam hal ini, penggunaan website diatur dalam Instruksi presiden nomor 3 tahun 2003 tentang strategi dan kebijakan pengembangan E-Government.

Hadirnya instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003 agar; (1) Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat; (2) Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (e-government) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan; (3) Menyelenggarakan pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan e-government.

Dengan hadirnya website di setiap kabupaten/kota di Indonesia agar memiliki kesamaan pemahaman, keserempakan tindak dan keterpaduan langkah dari seluruh unsur kelembagaan pemerintah, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan instruksi presiden bagi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan e-government secara nasional.

Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003 ditindak lanjuti melalui surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informasi nomor 65 Tahun 2005 perihal pengembangan layanan pemerintah secara elektronik pada berbagai instansi pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 28/perkominfo/9/2006 tentang penggunaan domain go.id untuk situs resmi pemerintah pusat dan daerah.

Kabupaten Luwu merupakan daerah yang telah melakukan penerapan kebijakan instruksi Presiden dengan hadirnya website diskominfo. luwuukab.go.id. Website tersebut, berfungsi untuk memberi kemudahan dalam mengakses informasi tentang kabupaten luwu. Melalui peraturan Bupati Luwu Nomor 21 Tahun 2020 tentang pendayagunaan website di ruang lingkup pemerintah Kabupaten Luwu.

Pendayagunaan website di lingkungan pemerintah kabupaten Luwu adalah untuk terciptanya penyelenggara website yang mampu memberikan dan menyediakan data serta informasi bagi kepentingan pemerintah daerah dan upaya peningkatan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui jaringan internet. Website pemerintah Kabupaten Luwu adalah situs resmi pemerintah Kabupaten Luwu di internet dalam rangka menyampaikan informasi penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan kepada masyarakat dan website pemerintah Kabupaten Luwu terdiri dari website induk dan website SKPD.

Adapun portal resmi Kabupaten Luwu dalam perbup nomor 21 tahun 2020 yaitu luwukab.go.id dan website SKPD. Website luwukab.go.id merupakan website induk pemerintah merupakan website yang memuat informasi-infromasi umum mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kabuapaten luwu sedang website SKPD yang memuat infromasi khusus mengenai penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh SKPD bersangkutan sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan dan berhasil menghasilkan output dan outcomes seperti direncanakan. Untuk dapat mewujudkan output dan outcomes yang ditetapkan, maka kebijakan publik perlu untuk diimplementasikan sebab jika tidak, maka kebijakan tersebut hanya akan menjadi catatan-catatan elit sebagaimana dipertegas oleh Udoji yang mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan (Agustino, 2008).

Implementasi kebijakan merupakan bagian dari proses pembuatan kebijakan (policy making process). Seperti dinyatakan Hasbullah (2015), bahwa proses pembuatan kebijakan merupakan proses politik yang berlangsung dalam tahap-tahap pembuatan kebijakan politik, dimana aktivitas politis ini dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan, dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung satu sama lainnya, diatur menurut urutan waktu, seperti penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan.

Senada dengan pendapat di atas, Dunn (2003) mengilustrasikan secara rinci fase-fase dan karakteristik pembuatan kebijakan itu, di mana implementasi merupakan bagian didalamnya. Fase pertama, adalah penyusunan agenda, karakter fase ini misalnya para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Fase kedua adalah formulasi kebijakan, karakter fase ini misalnya para pejabat merumuskan alternative kebijakan untuk mengatasi masalah.

Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif, keputusan peradilan dan tindakan legislatif. Fase ketiga adalah adopsi kebijakan, karakter fase ini misalnya alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dan mayoritas legislatif, konsensus di antara direktur lembaga, atau keputusan peradilan. Fase keempat adalah implementasi kebijakan, karakter fase ini misalnya kebijakan

yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia.

Dan fase terakhir adalah penilaian kebijakan, karakter fase ini misalnya unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintahan menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif dan peradilan memenuhi persyaratan undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Resta F, (2013) dengan judul Peran bagian pengolahan data elektronik dalam penyelenggaraan E-Government bahwa pendayagunaan website resmi telah mencapai tahapan interaksi melalui forum chat dan email, sudah mempunyai fungsi dan orientasi guna pencapaian visi dan misi Kota Semarang dan bagian-bagian terkait dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan peningkatan pelayanan public.

Perkembangan teknologi informasi tersebut diterapkan dalam bentuk penyelenggaraan pemerintahan agar publik dapat mengetahui dan mengawasi kinerja pemerintah dalam rangka mewujudkan *good governance*. Salah satu bentuk dari penyelenggaraan pemerintahan dengan penggunaan suatu sistem manajemen yang berbasis teknologi, yang populer disebut dengan *e-government*.

E-Government meruapakan bentuk penerapan pelayanan yang dapat meningkatkan mutu pelayanan publik dengan berbasis teknologi

dan komunikasi demi menjawab tuntutan dan kebutuhan publik yang menginginkan proses pengolahan data yang cepat dan informasi yang tepat. E-Government diperlukan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dengan maksud agar tumbuh peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap citra pelayanan pemerintah khususnya birokrasi.

Hootsuite (We are Social) menyajikan data beserta tren yang dibutuhkan dalam memahami internet, media sosial dan perilaku e-commerce setiap tahun secara berkala. Data yang disajikan adalah data yang meyeluruh di seluruh belahan dunia, termasuk juga Indonesia. Biasanya Hootsuite menerbitkan data tentang tren internet dan media sosial pada bulan kedua setiap tahunnya. Hal tersebut dikarenakan Hootsuite mengadakan kuesioner pada akhir tahun sebelumnya, dan diolah dulu di awal tahun.

Dan pada tahun 2022 ini, Hootsuite mengeluarkan data dan tren tentang internet serta media sosial pada 15 Februari yang lalu.



Gambar 1.1 Data Pengguna Internet

- Total Populasi (jumlah penduduk): 277,7 juta (tahun 2021: 274,9 juta/naik 1%).
- Perangkat Mobile yang terhubung: 370,1 juta (tahun 2021: 345,3 juta/naik 3,6%).
- Pengguna Internet: 204,7 juta (2021: 202,6 juta/naik 1%).
- Pengguna Media Sosial Aktif: 191,4 juta (2021: 170 juta, naik 12,6%)

Berdasarkan data yang dikemukakan oleh Hootsuite tentang pengakses website/internet di seluruh dunia terkhusus di Indonesia berjumlah 204,7 juta jiwa/2021. Hal ini tentunya mengerucut pada seluruh wilayah di Indonesia mengenai jumlah pengakses website/internet terkhususnya di kabupaten Luwu. Adapun jumlah penduduk di Kabupaten Luwu pada tahun 2017 sebanyak 356.305 jiwa terdiri dari 22 kecamatan 207 desa dan jumlah pegawai negeri sipil sebanyak 5.594 jiwa dari 57 satuan kerja perangkat daerah. Melihat jumlah pegawai negeri sipil yang terdaftar menurut siska BKPSDM Kab. Luwu bahwa pengakses web di ruang lingkup pemerintah berada pada rata-rata 5.594 orang.

Melalui website yang terintegrasi, akan sangat dimungkinkan bagi warga Kab. Luwu atau komunitas pebisnis, komunitas pemuda dan mahasiswa(i) untuk menyelesaikan sebuah transaksi dengan agensi pemerintah tanpa harus mengunjungi beberapa kantor daerah maupun dinas-dinas terkait. Selain itu, memungkinkan organisasi sektor publik untuk berinteraksi langsung dan bekerja lebih baik dengan bisnis,

terlepas dari lokasi “dunia fisik” mereka. Ini termasuk digitalisasi pelayanan pengadaan dari dan ke bisnis dalam rangka meningkatkan kualitas layanan, kenyamanan dan efektivitas biaya mereka (Heeks, 2001; McClure, 2000).

Dari permasalahan diatas maka penelitian bertujuan untuk mengetahui, mendalami dan menganalisis proses penerapan *e-government* dalam pengelolaan informasi di Kab. Luwu. Kontribusi penelitian ini untuk menjadi rekomendasi dan saran sekaligus untuk meningkatkan E-government dalam pengelolaan informasi di pemerintahan Kabupaten Luwu dan juga mewujudkan Good Governance di Kabupaten Luwu.

1. 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah diatas yang menjadi masalah penelitian adalah penelitian ini pada hakikatnya mengetahui, mendalami dan menganalisis proses penerapan *E-Government* dalam pengelolaan informasi di Kab. Luwu adalah :

- a. Bagaimana penerapan *E-Government* dalam penyelenggaraan Internal Pemerintah dan Eksternal Pemerintah?

1. 3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan pada rumusan masalah diatas, yang menjadi tujuan dari penelitian untuk mengetahui, mendalami dan

menganalisis proses penerapan kebijakan *E-Government* dalam pengelolaan informasi di pemerintah Kab. Luwu, secara rinci adalah :

- a. Mendalami serta mendeksripsikan penerapan *e-government* dalam pengelolaan informasi pemerintah di Kabupaten Luwu.

1. 4. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis sebagai sumber data dan informasi serta bahan referensi bagi mahasiswa dan peneliti yang akan melakukan penelitian lanjutan dan pengembangan teori *e-government* untuk meningkatkan pelayanan publik secara digital
- b. Manfaat Praktis Sumber data dan informasi sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Luwu

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2. 1. Landasan Teori

Bagian ini akan diuraikan berbagai konsep-konsep yang disesuaikan berdasarkan topik, judul dan fokus penulisan. Konsep-konsep ini menjadi landasan atau kerangka berpikir dalam perumusan pelaksanaan studi, kajian, dan penelitian yang dilakukan.

2.1.1 Kebijakan e-Government dalam Pemerintahan

Perkembangan teknologi informasi tersebut diterapkan dalam bentuk penyelenggaraan pemerintahan agar publik dapat mengetahui dan mengawasi kinerja pemerintah dalam rangka mewujudkan good governance. Salah satu bentuk dari penyelenggaraan pemerintahan dengan penggunaan suatu sistem manajemen yang berbasis teknologi, yang populer disebut dengan e-government.

Istilah kebijakan/kebijaksanaan muncul dalam waktu dan konteks yang berlainan sehingga menimbulkan keragaman istilah tertentu Laswell dan Kaplan dalam Islamy (1991), mengemukakan pendapatnya mengenai kebijaksanaan. *“policy as projected of good, values and practices“* (Kebijaksanaan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek praktek yang terarah). Dengan demikian kebijaksanaan diartikan sebagai sekumpulan tindakan-tindakan individukelompok, pemerintah/ swasta, baik yang

sengaja dilakukan maupun ketidakmampuan untuk bertindak secara sengaja yang diarahkan pada pemecahan masalah yang dihadapi untuk mencapai tujuan yang telah digariskan.

E-Government mulai diperkenalkan dalam institusi publik menjelang akhir abad 20 persisnya pada dekade akhir 1990-an. Teknologi informasi berkembang di Indonesia namun pengimplementasiannya di instansi – instansi pemerintahan dimulai sejak dikeluarkannya kebijakan pada tahun 2001 melalui Instruksi Presiden No. 6 tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung good governance dan mempercepat proses demokrasi. Selanjutnya dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government yang merupakan bukti nyata pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui *E-Government* (Aprianty, D. R. 2016).

Kebijakan adalah sebuah rangkaian konsep dan azas yang dijadikan garis besar dari dasar sebuah masalah. Menjadi sebuah rencana di dalam pelaksanaan sebuah pekerjaan, kepemimpinan dan cara dalam bertindak, prinsip, pernyataan cita-cita dan dalam memecahkan masalah sebagai garis pedoman. Kebijakan juga digunakan untuk manajemen di dalam usaha mencapai tujuan atau

sasaran. Dengan kata lain, kebijakan adalah pedoman dalam bertindak bagi pengambilan sebuah keputusan.

E-Government merupakan bentuk penerapan pelayanan yang dapat meningkatkan mutu pelayanan publik dengan berbasis teknologi dan komunikasi demi menjawab tuntutan dan kebutuhan publik yang menginginkan proses pengolahan data yang cepat dan informasi yang tepat. e-Government diperlukan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dengan maksud agar tumbuh peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap citra pelayanan pemerintah khususnya birokrasi.

Berdasarkan pengertian kebijakan tersebut, penulis mengartikan bahwa kebijakan adalah sebuah keputusan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang (Pemerintah) untuk diikuti dan dipatuhi serta dapat memengaruhi banyak orang dalam setiap keputusan dan tindakannya guna memecahkan permasalahan tertentu di tengah masyarakat (Aras, 2018).

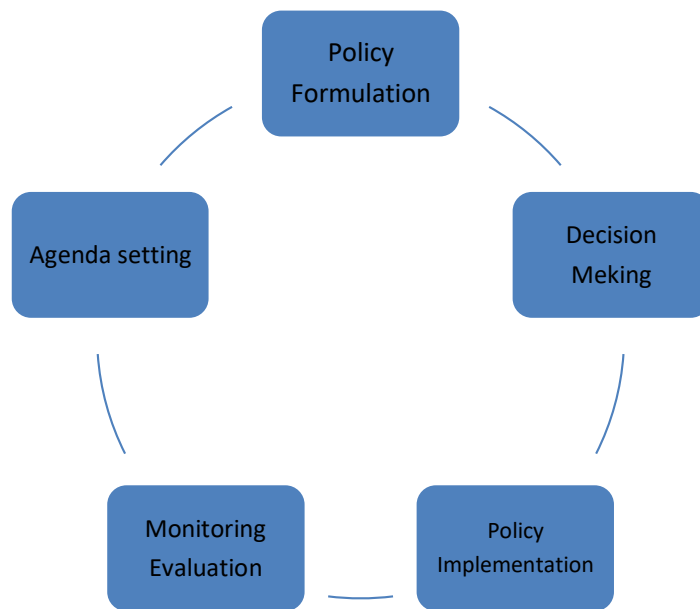
Menurut Carl Friedrich (dalam Manongga, et al., 2021) Kebijakan adalah salah satu tindakan yang mengarah pada tujuan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Menurut Anderson (dalam Amri, 2016) menyatakan bahwa dalam kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh suatu actor atau sejumlah actor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan.

Model rasional menekankan bahwa proses kebijakan merupakan proses yang rasional dan dilakukan oleh aktor-aktor yang memiliki cara berpikir yang rasional. Menurut model ini, proses kebijakan meliputi tahap-tahapan tertentu dan berjalan seperti sebuah siklus. Para aktornya dapat secara jelas melihat tujuan dari kebijakan dan cara mencapai tujuan tersebut. Sejak tahun 1950an, konsep ini telah berkembang dan menghasilkan berbagai variasi, namun memiliki esensi yang sama (Laswell, H.D., & Martin Robertson: 1978).

Kebijakan akan dimulai dari adanya masalah yang teridentifikasi masuk ke dalam agenda kebijakan (atau, agenda setting). Kemudian setelah informasi yang diperlukan terkumpul, ditemulan berbagai pilihan dan alternative kebijakan, sehingga dapat disusun sebuah kebijakan (policy formulation). Kemudian diambil keputusan mengenai rancangan kebijakan yang paling efisien dan efektif dan diputuskan sebagai suatu kebijakan yang memiliki kekuatan hukum (decision making). Hasilnya adalah sebuah kebijakan yang hampir ideal dan optimal. Setelah ini kebijakan dijalankan (policy implementation) dan dievaluasi (monitoring &

evaluation), apabila ditemukan masalah-masalah baru, masalah tersebut akan masuk menjadi agenda kebijakan dan memulai siklus ini kembali.



Gambar 2.1 Siklus Kebijakan Ideal

Sumber : Gambar di ambil dari google 2022

Proses kebijakan adalah proses yang meliputi kegiatan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan. Dalam hal ini kita khususnya membahas kebijakan publik, yaitu kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk kepentingan publik.

Pemahaman umum mengenai implementasi kebijakan dapat diperoleh dan para penganjuranya. Generasi pertama diwakili oleh studi Pressman dan Wildavsky yang terfokus pada bagaimana keputusan otoritas tunggal dilaksanakan atau tidak dilaksanakan.

Hasilnya memberi pengakuan sifat atau kakikat implementasi yang kompleks. Generasi kedua terfokus pada deteminan keberhasilan implementasi kebijakan (Akib, 2010).

Implementasi kebijakan dapat diperoleh dari pernyataan Grindle (1980: 7) bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran. Jika pemahaman ini diarahkan pada lokus dan fokus (perubahan) dimana kebijakan diterapkan akan sejalan dengan pandangan Van Meter dan van Horn yang dikutip oleh Parsons (1995: 461) dan Wibawa, dkk., (1994: 15) bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan dan berhasil menghasilkan output dan outcomes seperti direncanakan. Untuk dapat mewujudkan output dan outcomes yang ditetapkan, maka kebijakan publik perlu untuk diimplementasikan tanpa diimplementasikan maka kebijakan

tersebut hanya akan menjadi catatan-catatan elit sebagaimana dipertegas oleh Udoji yang mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan (Agustino, 2008).

Alasan mengapa implementasi kebijakan diperlukan mengacu pada pandangan para pakar bahwa setiap kebijakan yang telah dibuat harus diimplementasikan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan diperlukan karena berbagai alasan atau perspektif. Berdasarkan perspektif masalah kebijakan, sebagaimana yang diperkenalkan oleh Edwards (1984: 9-10), implementasi kebijakan diperlukan karena adanya masalah kebijakan yang perlu diatasi dan dipecahkan. Menurut Teori Implementasi Kebijakan George Edward (Dwi, 2009) implementasi kebijakan adalah proses krusial yang menentukan seberapa baiknya suatu kebijakan disiapkan dan dirancang untuk mencapai tujuan kebijakan publik.

Edwards memperkenalkan pendekatan masalah implementasi dengan mempertanyakan faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan pertanyaan retorik tersebut dirumuskan empat faktor sebagai sumber masalah sekaligus prakondisi bagi keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap

birokrasi atau pelaksana, dan struktur organisasi termasuk tata aliran kerja birokrasi.

2. 1. 2. Kontigensi dalam e-Government

Para ahli mengusulkan tujuh tonggak kepemimpinan e-government dan dia berpendapat bahwa “para pemimpin yang mendefinisikan e-government dalam arti sempit hanya memindahkan layanan online-kehilangan peluang lebih besar yang akan menentukan keunggulan kompetitif dalam jangka panjang(Antoni, 2019). Untuk menunjukkan hal ini, dia menyarankan bahwa pemahaman yang lebih luas tentang e-government diperlukan agar para pemimpin dapat memposisikan pemerintah, warga negara, bisnis, dan komunitas mereka secara luas untuk keuntungan strategis yang berkelanjutan (Koesharijadi & Akbar, 2019).

Tabel 1 berikut Ini mengilustrasikan pencapaian utama dan menyoroti bidang utama pencapaian dengan deskripsi singkat dari setiap pencapaian.

Tabel 2.1 Tujuh Tonggak Kepemimpinan e-Government

TONGGAK	Area pencapaian	Deskripsi Singkat

1	Integrasi	Proses dan integrasi teknologi melalui portal. Itupenggunaan Internet oleh pemerintah sangat penting.
2	Pertumbuhan Ekonomi	Perkembangan ekonomi era digital umumnya memiliki lima dimensi memanfaatkan usaha kecil dan menengah, pendidikan, menarik industri teknologi tinggi, akses ke infrastruktur teknologi, dan pemerintahan yang ramah bisnis.
3	E-Demokrasi	Manifestasi dari e-demokrasi membentang diseluruh spektrum proses demokrasi. Ini untuk

		menginformasikan dan melibatkan warga.
4	E-Komunitas	Pemerintah adalah intrinsik bagi komunitas dengan cara yang fundamental. Kesehatan dan keselamatan publik, taman dan rekreasi, layanan lansia dan pemuda. Teknologi elektronik menawarkan pemerintah memiliki banyak kesempatan untuk meningkatkan komunitas.
5	Antar Pemerintah	Fenomena antar pemerintah merupakan unsur inti dari e-government. Di tingkat global, badan kuasi-

		pemerintah muncul untuk mengumpulkan pengetahuan dan sumber daya. Performa yang lebih tinggi akan tercapai.
6	Lingkungan Kebijakan	Menciptakan kerangka hukum baru untuk menghadapi dunia digitalusia. Seperti tanda tangan digital, kesenjangan digital, dan hukum peretas.
7	Internet Generasi Berikutnya	Ini adalah batu penjuru dari strategi e-government yang kompetitif. E-Government akan ditentukan besoklingkungan untuk mendapatkan keuntungan.

Ketujuh tonggak ini merangkum apa itu e-government dan memberi para pemimpin pemerintahan kerangka kerja untuk melakukan proses transformasi tersebut dan mencapai tingkat kematangan e-government yang tertinggi (Legi & Oentoe, 2020). Seperti yang telah dibahas sebelumnya, proses penerapan transformasi e-government melewati tahapan yang berbeda hingga mencapai tingkat kedewasaan, yaitu integrasi tanpa batas antara layanan.

Seperti diuraikan sebelumnya, kepemimpinan yang kuat dapat mempercepat proses penerapan e-government, mendorong koordinasi di dalam dan di antara lembaga, dan membantu memperkuat tujuan tata kelola yang baik. Fakta bahwa e-government memiliki banyak dimensi merupakan masalah yang kompleks. Setiap dimensi menuntut kepemimpinan yang kuat, strategi, koordinasi silang, dan pengetahuan, semua dikombinasikan dengan strategi teknologi untuk mewujudkan visi menjadi kenyataan.

Dengan tujuan untuk memfasilitasi keterlibatan yang lebih mudah, lebih hemat waktu, dan lebih interaktif dengan departemen pemerintah, dan untuk membuat bisnis lebih efektif dan efisien melalui penggunaan teknologi, para pemimpin e-government memulai berbagai inisiatif e-government.

Berikut ini adalah beberapa alasan, untuk menyebutkan beberapa, mengapa diperlukan gaya kepemimpinan visioner yang baru:

1. Tugas yang rumit; kesadaran akan teknologi baru, mengatasi hambatan dan perubahan Organisasi
2. Transformasi sangat mahal Alokasi anggaran, Pengembangan Sistem dan manajemen, Perubahan Infrastruktur Membutuhkan komitmen jangka panjang; dan Faktor Risiko, Perubahan Teknologi Juga perlu memiliki pemahaman tentang strategi pemerintah secara keseluruhan Merumuskan strategi baru, Kesadaran silang hambatan batas dan kebijakan Para penulis berpendapat bahwa tipe pemimpin baru diperlukan untuk melintasi "e-Chasm"

2. 1. 3. Kelembagaan pemerintahan

Kelembagaan (*institution*) sebagai aturan main (*rule of game*) dan organisasi, berperan penting dalam mengatur penggunaan/alokasi sumber daya secara efisien, merata dan berkelanjutan. Menurut sahyuti (2006). Suatu kelembagaan adalah suatu pemantapan perilaku yang hidup pada suatu kelompok orang yang merupakan sesuatu yang stabil, mantap dan berpola; berfungsi untuk tujuan-tujuan tertentu dalam masyarakat; ditemukan dalam sistem sosial tradisional dan modern atau bisa berbentuk tradisional

dan modern dan berfungsi mengefisienkan kehidupan sosial secara khusus.

Hadirnya kelembagaan negara, menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca amandemen keempat dalam struktur kelembagaan terdapat delapan (8) organ negara yang berkedudukan sederajat dan secara langsung menerima kewenangan konstitusional. Kedelapan organ tersebut adalah : (1) Dewan Perwakilan Rakyat; (2) Dewan Perwakilan Daerah; (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat; (4) Badan Pemeriksa Keuangan; (5) Presiden dan Wakil Presiden; (6) Mahkamah Agung; (7) Mahkamah Konstitusi; (8) Komisi Yudisial.

Di samping kedelapan lembaga negara tersebut, terdapat pula beberapa lembaga negara atau institusi yang diatur kewenangannya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yaitu: (1) Tentara Nasional Indonesia; (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia; (3) Pemerintah Daerah; (4) Partai Politik. Selain itu ada pula lembaga negara yang secara eksplisit tidak disebut namanya, tetapi fungsinya secara implisit terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 namun kewenangannya akan diatur dengan undang-undang yaitu: Bank sentral yang tidak disebut namanya "Bank Indonesia", dan Komisi Pemilihan Umum dalam konstitusi hanya ditulis dengan huruf kecil.

2. 1. 4. Kegunaan Website dalam e-Government

Website adalah kumpulan halaman web yang dapat diakses publik dan saling terkait yang berbagi satu nama domain. Website dapat dibuat dan dikelola oleh individu, grup, bisnis, atau organisasi untuk melayani berbagai tujuan dan website adalah lokasi pusat halaman web yang saling terhubung dan diakses dengan mengunjungi halaman rumah dari website menggunakan browser (Mardatila, 2021).

Website adalah kumpulan halaman yang berisi informasi tertentu dan dapat diakses dengan mudah oleh siapapun, kapanpun, dan di manapun melalui internet. Anda bisa mengakses website dengan menuliskan URL di alamat website di browser (Wijayanti, 2021).

Website sebagai salah satu bentuk aplikasi e-government dipilih karena kebutannya lebih murah dan mudah dibanding bentuk aplikasi lain. Serta jaringan internet yang luas sangat cocok untuk proses penginformasian kepada masyarakat, terutama yang terhubung dengan koneksi internet sehari-harinya (Resta & Reni, 2013).

Ada beberapa unsur dalam website itu sendiri di antaranya :

- a. Hosting adalah sebuah layanan berupa server. Server dapat disebut sebagai media atau tempat yang digunakan untuk

menyimpan semua data yang akan ditampilkan pada website, seperti file dan database yang digunakan. Hosting harus bekerja secara penuh dan terusmenerus agar dapat diakses menggunakan internet. Pada prinsipnya, jika hosting tidak aktif, maka website yang sudah ada tidak dapat diakses.

- b. Domain adalah sebuah sistem yang digunakan untuk menyimpan penamaan dari sebuah website. Kumpulan domain yang berbeda jika digabungkan akan membentuk sebuah URL (*Uniform Resource Locator*), yang bersifat unik. Arti unik pada URL adalah tidak akan ada domain yang sama di internet.

2. 1. 5. Website Bagian Dari *E-Government*

Penerapan *e-Government* dapat mendukung dan meningkatkan kinerja pemerintah dalam *E-Government* telah menjadi bidang penelitian yang multidisipliner. Selain ilmu komputer, ada beberapa bidang ilmu yang lain dalam *E-Government* seperti administrasi publik, manajemen, politik, sosial budaya, dll. Meskipun pondasi teoritis *e-Government* masih terus dikembangkan, namun *e-Government* telah memenuhi syarat sebagai suatu disiplin ilmu yang baru (Assar, 2011). Heeks (2006) menyatakan bahwa *e-Government* adalah sebuah sistem informasi, yang dapat digambarkan sebagai sistem sosio-teknis karena merupakan kombinasi antara aspek sosial dan teknologi (Avison, 2003).



Gambar 2.2 E-Government sebagai system informasi

Sumber : di ambil dari Google, 2022

Gambar 2.2 di atas menunjukkan bahwa dalam mengelola *e-Government*, aspek sosial dan teknologi akan termasuk didalamnya. Bahkan aspek sosial lebih sering menyebabkan kegagalan dibandingkan dengan aspek teknologi (Heeks, 2006). Namun model *e-government* di atas belumlah lengkap, ada berbagai aspek yang lain seperti aspek manajemen, politik, ekonomi, budaya, sumber daya dan aspek lainnya yang melekat pada organisasi sektor publik. Keseluruhan aspek tersebut harus diperhatikan oleh pengembang dalam mengembangkan sebuah sistem *e-government*. Akan tetapi, *e-government* berbeda dengan sistem informasi pada umumnya yang memiliki target pada sektor swasta. Orientasi utama dari *e-government* adalah tersedianya akses informasi oleh publik dibandingkan keuntungan finansial. Hal ini disebabkan bahwa target *e-Government* adalah sektor publik, oleh karena itu sistem *e-government* pada umumnya dibangun berbasis teknologi web.

E-Government berasal dari bahasa Inggris *Electronic Government*. Istilah *e-government* bisa disebut juga sistem pemerintahan online, e-gov, digital government atau pemerintah transformasi. *E-Government* adalah suatu upaya dari pemerintah dalam mengembangkan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan yang berbasis elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi (Febriansyah, 2021).

Pada table 2.1 di bawah ini akan di jelaskan 4 model E-Government sebagai berikut :

Tabel 2.1 di bawah ini akan di jelaskan 4 model E-Government

No	Model E-Government	Penjelasan
1.	Government to citizen (G2C)	Government to Citizen/Customer adalah penyampaian informasi pelayanan publik oleh pemerintah kepada masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi. G2C memungkinkan masyarakat untuk bertukar informasi dan melakukan komunikasi antar masyarakat dan pemerintah. G2C ini memiliki tujuan agar lebih mendekatkan diri kepada semua lapisan masyarakat, saat ini G2C paling banyak ditemui. Berikut beberapa penerapan Government to Citizen/Customer: sistem pajak online, layanan kesehatan, website pencari kerja disnaker, penerbitan dokumen pribadi

		(KTP, Akte, KK, Paspor dll), kantor imigrasi dan lain sebagainya
2.	Government to Employee (G2E)	Tidak hanya kepada para masyarakat saja, Government juga melayani lebih spesifik kepada para pegawai atau karyawan. Tujuannya agar memberikan pelayanan dan kenyamanan terhadap para pegawai dan karyawan. Beberapa layanan G2E antara lain: 1. BPJS Kesehatan & 2. BPJS Ketenagakerjaan
3.	Government to Business G2B	Model E-Government yang ketiga adalah Government to Business. Pemerintah sudah selayaknya membuat lingkungan bisnis yang kondusif dalam suatu negara agar para pelaku industri bisa aman dan nyaman dalam menjalankan bisnis mereka. Para pelaku bisnis akan banyak berinteraksi dengan pemerintahan, untuk itu perlu dibuat hubungan yang baik antar keduanya. Contoh penerapan Government to Business di Indonesia saat ini seperti pajak perseroan, pengurusan pendaftaran perusahaan, peraturan pemerintahan, hak paten merk dagang, ijin usaha dan lain sebagainya
4.	Government to Government G2G	Terkahir, model E-Government yang keempat adalah Government to Government. Komunikasi dan pertukaran informasi yang dilakukan antar

		departemen atau lembaga pemerintahan satu sama lainnya
--	--	--

Sumber : diolah dari Febriansyah (2021), 2022

Selain model E-Government yang di jelaskan di atas menurut Febriansyah (2021), kelebihan dan kekurangan E-Government sebagai berikut :

a. Kelebihan E-Government yaitu :

1. Untuk memperbaiki kualitas layanan dari pemerintah kepada semua pihak yang membutuhkan hubungan dengan pemerintahan. Dengan adanya E-Government diharapkan pelayanan bisa lebih efektif dan efisien.
2. Meningkatkan transparansi, kontrol dan akuntabilitas para penyelenggara negara dalam rangka menerapkan pemerintahan yang bersih bebas dari tindak pidana korupsi dan tindakan sejenisnya.
3. Mengurangi biaya administrasi, relasi dan interaksi yang dikeluarkan untuk pengurusan berbagai hal yang ada kaitannya dengan pemerintahan.
4. Pelayanan service kepada masyarakat bisa online tanpa harus menunggu jam buka kantor.
5. Hubungan pemerintahan dengan masyarakat, pekerja dan pelaku bisnis bisa lebih baik dengan adanya transparansi.

6. Pelayanan pemerintahan bisa lebih efisien.

7. Mewujudkan *good corporate governance*

b. Kekurangan E-Government yaitu :

1. Budaya berbagi informasi dalam pemerintahan masih jarang. Banyak para oknum yang memanfaatkan kesempatan dengan mempersulit dalam mendapatkan informasi.
2. Budaya mendokumentasikan belum lazim dilakukan oleh aparat pemerintahan. Padahal untuk zaman serba online sekarang ini semua dokumentasi sudah berbentuk digital, bukan lagi bentuk fisik yang memakan banyak ruang.
3. Kurangnya SDM yang handal dalam pemerintahan sehingga penggunaan teknologi informasi kurang maksimal.
4. Tempat akses informasi yang terbatas sehingga masyarakat tidak tahu dengan adanya E-Government.
5. Masih mahal biaya untuk membangun infrastruktur online.

2.1. 6. Good Governance

Menurut Sadjijono (2007:203) *good governance* mengandung arti “Kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara”. Sedangkan menurut IAN & BPKP (2005:5) yang dimaksud dengan *good governance* adalah:

“Bagaimana pemerintah berinteraksi dengan masyarakat dan mengelola sumber-sumber daya dalam pembangunan”.

World Bank mendefinisikan *Good Governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salag alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administrative, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha (World Bank, 1992).

World Bank merupakan pencetus gagasan pertama yang memperkenalkan *good governance* sebagai “program pengelolaan sektor public”, dalam rangka penciptaan ketata pemerintahan yang baik dalam kerangka persyaratan bantuan pembangunan.

2. 2. Hasil Penelitian Yang Relevan

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan Implementasi kebijakan pendayagunaan website dapat di lihat pada table berikut:

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Mandari, H. & Koloseni. D. (2016)	Research Article Evaluating Social Media Utilization on the Implementation of E- Government Goals in Tanzania (Penelitian Mengevaluasi Pemanfaatan Media Sosial pada Implementasi Tujuan E-Government di Tanzania)	Hasilnya mengungkapkan bahwa hanya 28,5% dari situs public yang terhubung ke media social. Selain itu, sebagian besar platform media social yang digunakan oleh berbagai institusi pemerintah tidak aktif dan jarang digunakan oleh berbagai institusi pemerintah tidak aktif dan jarang digunakan. Oleh karna itu, studi saat ini merekomendasikan untuk mempercepat adopsi dan pemanfaatan platform media social untuk memberikan layanan terkait informasi kepada warga di

			sektor public Tanzania
2.	Wang, T & Biederman. S. (2012)	Adoption and Utilization of Electronic Health Record Systems by Long-Term Care Facilities in Texas (Adopsi dan Pemanfaatan system catatan kesehatan elektronik oleh fasilitas perawatan jangka panjang di Texas	Peneliti menemukan bahwa di Texas, 39,5 persen fasilitas LTC telah sepenuhnya atau sebagian menerapkan sistem EHR dan 15 persen fasilitas LTC belum memiliki rencana untuk mengadopsi EHR. Ada variasi yang signifikan dalam penggunaan fungsi EHR di seluruh fasilitas LTC di Texas. Di fasilitas LTC, fungsi administrasi EHR telah diadopsi lebih luas dan lebih banyak digunakan daripada fungsi klinis EHR. Di antara fungsi klinis yang diadopsi, penilaian residen, perintah dokter, rencana manajemen perawatan, dan manajemen sensus

			<p>adalah fungsi utama yang digunakan oleh fasilitas LTC di Texas. Kurangnya sumber daya modal masih menjadi hambatan terbesar untuk adopsi dan implementasi EHR. Pembuat kebijakan, vendor, administrator LTC, pendidik, dan peneliti harus melakukan lebih banyak upaya untuk meningkatkan adopsi EHR di fasilitas LTC.</p>
3.	Oni, et, al. (2016).	<p>Evaluation of E-Government Implementation: The Case of State Government Websites in Nigeria (Evaluasi Implementasi E-Government: Kasus Situs Web Pemerintah Negara Bagian di Nigeria</p>	<p>. Studi ini mengevaluasi sejauh mana status implementasi e-government saat ini di Nigeria sesuai dengan strategi kebijakan TI nasional. Studi ini didasarkan pada analisis konten situs web resmi dari tiga puluh enam negara bagian dan</p>

			<p>wilayah ibu kota federal negara tersebut. Ini berfokus pada konten, fitur fungsional dan konstruksi situs web. Ditemukan bahwa, dari tiga puluh enam negara bagian, hanya dua puluh tiga (64 persen) yang memiliki situs web dan sebagian besar menyediakan informasi tekstual; hanya sedikit yang menyediakan dokumen digital yang dapat diunduh dan interaksi online yang fungsional. Kami merekomendasikan bahwa, selain kebijakan TI Nasional, pemerintah Nigeria perlu memiliki pedoman yang ditetapkan untuk implementasi e-government dan NITDA harus lebih</p>
--	--	--	---

			<p>proaktif dalam tugasnya memantau implementasi kebijakan TI. Perancang situs harus mengakui pentingnya situs web pemerintah sebagai saluran utama untuk penyebaran informasi, untuk memfasilitasi interaksi warga dengan pemerintah dan untuk mengubah operasi pemerintah. Dengan demikian, situs web harus lebih dari sekadar papan pengumuman statis tetapi berorientasi pada fungsi, dinamis, dan interaktif</p>
4.	Nica, (2014).	The Effectiveness Of Social Media Implementation At Local Government Levels, (Efektivitas Pelaksanaan Sosial	<p>Tujuan artikel ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang pengelolaan media</p>

		Media Di Tingkat Pemerintah Daerah)	<p>sosial di tingkat pemerintah daerah, ketersediaan peluang dialog warga di situs web pemerintah, dan dampak aplikasi jejaring sosial terhadap e-government. Hasil penelitian saat ini menyatu dengan penelitian sebelumnya tentang meningkatnya kesadaran di antara praktisi pemerintah mengenai relevansi media sosial, penggunaan media sosial untuk umpan balik tentang kualitas layanan, dan komitmen privasi dan keamanan dalam e-government. Literatur tentang penggunaan teknologi informasi untuk mengubah pemerintahan, potensi informasi pemerintah online</p>
--	--	-------------------------------------	--

			<p>untuk berkontribusi pada keterlibatan warga, dan pertumbuhan yang cepat dalam penggunaan media sosial oleh pemerintah daerah relevan dengan diskusi ini.</p>
5.	<p>Bolívar, M. P. R., & Muooz, L. A. (2018).</p>	<p>Political Ideology and Municipal Size as Incentives for the Implementation and Governance Models of Web 2.0 in Providing Public Services. (Ideologi Politik dan Ukuran Kota Sebagai Insentif Model Implementasi dan Tata Kelola Web 2.0 dalam Memberikan Pelayanan Publik).</p>	<p>bertujuan untuk berkontribusi pada perdebatan terkini tentang teknologi Web 2.0 dan implikasinya bagi pemerintahan lokal, melalui identifikasi persepsi pembuat kebijakan di pemerintah daerah tentang penggunaan Web 2.0 dalam menyediakan layanan publik (alasan, keuntungan dan risiko) dan tentang perubahan peran yang dapat dipicu oleh teknologi ini</p>

			<p>dalam interaksi antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingannya (model tata kelola). Makalah ini juga menganalisis apakah ukuran kota merupakan faktor utama yang dapat mempengaruhi persepsi pembuat kebijakan mengenai topik utama tersebut. Temuan menunjukkan bahwa pembuat kebijakan bersedia untuk menerapkan teknologi Web 2.0 dalam menyediakan layanan publik, tetapi lebih disukai di bawah kerangka model Birokrasi, sehingga mempertahankan peran utama dalam implementasi ini. Ukuran kota merupakan faktor</p>
--	--	--	--

			yang dapat mempengaruhi persepsi pembuat kebijakan.
6.	Yildiz, M. (2009).	An overview of local E-government adoption and implementation in Turkey. (Tinjauan tentang adopsi dan implementasi E-government lokal di Turki)	Bab ini menyajikan analisis adopsi dan implementasi e-government lokal di Turki. Untuk tujuan ini, artikel akademis, berbagai undang-undang, dan bagian dari Rencana Strategis Masyarakat Informasi Turki yang baru diadopsi yang berkaitan dengan e-government lokal, laporan implementasi e-government lokal ditinjau. Bab ini juga membahas integrasi aplikasi e-government lokal dalam sebuah portal dan upaya untuk menghubungkan portal ini ke sistem manajemen kinerja

			<p>berbasis web untuk pemerintah daerah. Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa ada ketidakkonsistenan terkait mandat dan implementasi e-government di daerah. Bab ini diakhiri dengan evaluasi keadaan saat ini dan area penelitian masa depan tentang e-government lokal di Turki</p>
7.	Ruano de la Fuente, J. M. (2014).	E-Government Strategies in Spanish Local Governments, (Strategi E-Government di Pemerintah Daerah Spanyol)	<p>Pemerintah daerah baru-baru ini menginvestasikan sumber daya manusia dan material yang cukup besar untuk mencoba memberikan layanan dengan cara yang lebih efisien. Meskipun kemajuan yang dicapai dalam penerapan teknologi</p>

			<p>informasi dan komunikasi (TIK) telah signifikan, analisis terhadap semua pemerintah daerah menunjukkan bahwa dampaknya terhadap kebijakan reformasi tidak merata, dan bahwa tujuan sebenarnya dari proses modernisasi ini tidak selalu telah sama. Sebagian besar pemerintah telah memilih strategi yang mereproduksi cara kerja administrasi tradisional; sedangkan hanya sedikit yang mencoba memanfaatkan potensi yang ditawarkan TIK untuk menyediakan lebih banyak transparansi, layanan online baru, dan membuat administrasi lebih</p>
--	--	--	--

			menerima kebutuhan warga.
8.	Nabafu, R., & Maiga, G. (2012).	A Model of Success Factors for Implementing Local E-government in Uganda , (Model Faktor Keberhasilan Penerapan Egovernment Lokal di Uganda).	Studi ini mencoba menjawab masalah ini dengan menggambarkan model implementasi pemerintahan lokal di negara transisi, Uganda. Sebuah studi lapangan digunakan untuk mengumpulkan persyaratan untuk model. Hasilnya digunakan untuk memperluas model yang ada untuk menggambarkan model yang cocok untuk Uganda. Berdasarkan hasil yang dikumpulkan dari lapangan, penelitian ini merekomendasikan bahwa model perluasan implementasi

			<p>pemerintah daerah harus memperhatikan dimensi mobilisasi sumber daya keuangan, infrastruktur TIK, pelatihan, sensitisasi, kepercayaan dan faktor sosial politik. Model divalidasi dalam studi lapangan berbasis kuesioner</p>
--	--	--	--

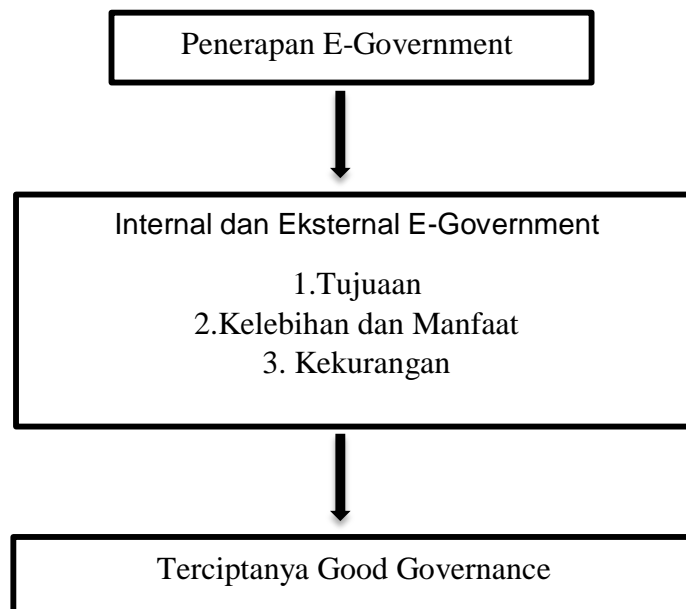
9.	Joseph, C., & Taplin, R. (2012).	Local government website sustainability reporting: a mimicry perspective. (Pelaporan keberlanjutan situs web pemerintah daerah: perspektif mimikri).	Menemukan bahwa 15 dari 16 dewan yang diwawancarai meniru informasi keberlanjutan di situs web dewan lain. Wawancara mengungkapkan bahwa mereka melakukannya untuk menyalin ide tentang implementasi kegiatan keberlanjutan daripada format pelaporan. Dewan meniru situs web Malaysia dan internasional.
10.	Erhan, N. (2018).	Evaluation of E-Government Implementation in Indonesian Local Government (Case Study of the Implementation of Electronic Monitoring and Evaluation in Balangan Local	Penelitian ini menyimpulkan bahwa, permasalahan kritis yang dihadapi dalam penerapan e-government di pemerintah daerah bukan hanya masalah teknis, tetapi lebih

		Government). (Evaluasi Implementasi E-Government di Pemerintah Daerah Indonesia (Studi Kasus Implementasi Monitoring dan Evaluasi Elektronik di Pemerintah Daerah Balangan).	pada pengelolaan sistem dan kesadaran masyarakat. Pemerintah pusat perlu campur tangan untuk adopsi yang lebih baik dari e-government di pemerintah daerah.
--	--	---	--

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran penelitian Implementasi Kebijakan Pendayagunaan website di Kabupaten Luwu digambarkan dalam bagan kerangka pikir sebagaimana terlihat pada skema berikut:

Gambar 2.3 skema Kerangka Pikir Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Luwu. Selain itu untuk melengkapi data dan informan penelitian, peneliti berkordinasi dengan dinas kominfo sebagai pengelola. Pada saat penyusunan proposal telah dilakukan studi pendahuluan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diteliti

3.2 Jenis dan Tipe Penelitian

- a. Berkaitan dengan tujuan penelitian adalah untuk memberikan sebuah gambaran mengenai penerapan e-government dalam pengelolaan informasi di dinas Kominfo Kab. Luwu, maka jenis dari penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Menurut (Sugiono) mengemukakan bahwa bila masalah belum jelas atau masih samar-samar, kondisi semacam ini cocok diteliti dengan metode kualitatif karena peneliti kualitatif akan langsung masuk ke obyek, melakukan penjelajahan dengan *grant tour question*, sehingga masalah akan ditemukan dengan jelas.
- b. Tipe penelitian ini adalah tipe fenomenologi dimaksudkan untuk memberi sebuah gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti berdasarkan pengalaman yang di alami informan. Adapun masalah yang diteliti adalah mengenai